

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

President Tiongkok Xi Jinping mengumumkan sebuah kebijakan untuk melebarkan sayap perekonomiannya melalui pengembangan infrastruktur di wilayah jalur sutra yang dikenal sebagai kebijakan *Belt and Road Initiative*.

Jalur Sutra adalah jalur perdagangan yang menghubungkan antara Timur dan Barat yang dihubungkan oleh pengembara, pedagang, biarawan, dan nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal. Jalur Sutra ini dibuka oleh seorang jenderal bernama Zhang Qian (164 SM – 113 SM) dari Dinasti Han. Jalur ini sangat penting karena jalur ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan Tiongkok, India, dan Roma.

Istilah “Jalur Sutra” pertama kali digunakan oleh geographer asal Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 karena barang yang banyak diperdagangkan oleh Tiongkok berupa sutra. Jalur Ini memiliki banyak cabang dari ibukota Dinasti Tang Tiongkok di Timur hingga ke Roma, ibu kota Italia di Barat. Jalur ini melewati Afghanistan, Uzbekistan, Iran, sampai ke Alexandria Mesir. Ada juga cabang lain yang melalui Pakistan, Kabul, Afghanistan sampai ke teluk Persia.

Dalam melancarkan kebijakan *Belt and Road Initiative* ini, Pemerintah Tiongkok melakukan serangkaian kerja sama terhadap negara negara yang dilewati Jalur Sutra seperti memberikan pinjaman untuk mengembangkan infrastruktur yang berguna bagi kelancaran proyek *Belt and Road Initiative*, Seperti pembangunan rel

kereta, jalan dan Pelabuhan dengan dana dari pemerintah Tiongkok senilai miliaran dolar di sejumlah negara (CNN Indonesia, 2018).

Jalur Sutra menjadi salah satu lokasi strategi pembangunan Tiongkok yang berfokus membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, jalan raya, jalur perairan, jalur penerbangan, dan jaringan perdagangan yang menghubungkan antara Asia, Eropa, dan Afrika (Setiawan, 2017).

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di seluruh dunia. “*Belt and Road Initiative*” ini menjadi dasar bagi Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam membuat kebijakan luar negeri. Kebijakan ini telah berhasil merangkul dan melibatkan lebih dari 60 negara dengan total pengeluaran dana sebesar USD\$ 4.4 triliun.

Dalam kunjungannya di Kazakhstan, Xi Jinping mengusulkan “untuk membuat ikatan ekonomi lebih dekat, kerja sama yang lebih dalam dan ruang pengembangan yang lebih luas antara negara-negara Eurasia, Xi Jinping menyampaikan “Kita harus mengambil pendekatan inovatif dan bersama-sama membangun sabuk ekonomi di sepanjang jalur sutra” (Jinping, President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries, 2013).

Xi Jinping juga menyampaikan dalam pidatonya di Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 bahwa Asia Tenggara sejak zaman kuno menjadi pusat penting di sepanjang Jalan Sutra Maritim kuno. Tiongkok akan memperkuat kerja sama maritim dengan negara-negara ASEAN untuk memanfaatkan dengan baik Dana Kerja sama Maritim ASEAN Tiongkok yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok.

Xi Jinping mengatakan “Kedua belah pihak harus bekerja sama dalam membangun jalur sutra maritime untuk abad ke-21 (Jinping, Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament, 2013).

Dari pidato tersebut, dapat kita tangkap bahwa dari kebijakan *Belt and Road Initiative* ini Tiongkok berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan baik untuk Tiongkok maupun negara-negara yang berpartisipasi, namun juga dapat mempererat hubungan antar negara tersebut. Kebijakan “*Belt and Road Initiative*” yang digagas oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping ini tentu saja akan berdampak terhadap negara- negara dan wilayah yang dilalui oleh jalur tersebut. dan ini juga memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi Tiongkok yang dimana akses perdagangan ke berbagai belahan dunia dipermudah dengan adanya kebijakan “*Belt and Road Initiative*” ini

Proyek *Belt and Road Initiative* ini juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia di era Joko Widodo yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Proyek *Belt and Road Initiative* ini dianggap dapat menguntungkan negara karena dianggap mampu membantu peningkatan infrastruktur kelautan. Seperti yang kita ketahui, 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2018). Hal inilah yang membuat Joko Widodo mencetuskan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Namun, proyek *Belt and Road Initiative* ini diduga menjadi sebuah kerja sama yang beresiko menjadi Debt-Trap karena Tiongkok secara mudah menawarkan

miliaran dolar untuk memberikan bantuan berbentuk pinjaman kepada negara-negara berkembang yang tergabung dalam proyek ini untuk mengembangkan infrastruktur yang bermanfaat bagi kedua pihak dengan syarat-syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman dari barat. Biasanya untuk mendapatkan pinjaman dari barat, negara-negara harus memenuhi standar etik yang ketat, namun negara berkembang yang diberikan pinjaman oleh Tiongkok dianggap tidak dapat diandalkan sehingga tidak mampu mengganti pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok. Oleh karena itu apabila sewaktu waktu Tiongkok meminta pengembalian pinjaman yang diberikan, maka negara tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah

• **Strategi apa yang dirumuskan oleh Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya *Debt Trap* dari kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek *Belt and Road Initiative*?**

1.3 Kerangka Berpikir

Teori merupakan bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Teori dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah (Mas'oed, 1990).

1.3.1 Konsep Jebakan Hutang / Debt-Trap

Jebakan hutang atau Debt-Trap adalah suatu keadaan yang di mana peminjam sulit atau tidak mungkin membayar kembali uang yang telah mereka pinjam. Perangkap ini biasanya disebabkan oleh suku bunga tinggi dan jangka pendek (Opportunity Financial, LLC, 2016).

Perangkap hutang atau Debt-Trap dapat terjadi setiap kali seseorang meminjam uang dari seorang pemberi pinjaman, baik pinjaman atau kredit. Ada dua hal yang mendasar dalam perjanjian pinjaman. Pertama, ada pokok pinjaman, yaitu jumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur terhadap debitur. Kedua, ada

bunga, yaitu sejumlah uang yang dikenakan kreditur terhadap debitur atas pinjaman uang pokok yang diberikan oleh kreditur. (Opportunity Financial, LLC, 2016)

Membayar kembali uang pinjaman berarti membayar kembali pokok dan bunganya. Membayar kembali pokok pinjaman sangat penting karena itu satu-satunya cara peminjam membuat kemajuan dalam melunasi pinjaman secara penuh. Banyak pinjaman angsuran datang dengan struktur amortisasi, yang berarti bahwa pinjaman dirancang untuk dilunasi dalam serangkaian pembayaran tetap dan teratur; setiap pembayaran berlaku untuk pokok dan bunganya (Opportunity Financial, LLC, 2016).

Jumlah bunga yang dikenakan pada pinjaman bervariasi tergantung pada beberapa faktor, yaitu:

- kelayakan kredit dari peminjam,
- jenis pinjaman yang dikeluarkan,
- Kelayakan Ekonomi.

Kredit peminjam merupakan faktor yang sangat penting. Karena, orang-orang dengan nilai kredit yang baik biasanya dapat memenuhi syarat untuk pinjaman yang lebih baik pada tingkat bunga yang lebih rendah. Orang-orang dengan kredit buruk, di sisi lain, akan sering dibebani dengan tingkat yang lebih tinggi dan persyaratan yang kurang menguntungkan pada beberapa pinjaman yang bisa mereka dapatkan. Inilah sebabnya mengapa orang-orang dengan kredit buruk umumnya berisiko sangat tinggi untuk perangkap utang (Opportunity Financial, LLC, 2016).

Oleh karena itu, apabila dijelaskan dalam konteks antar negara. Debt-Trap adalah suatu kondisi yang dimana negara debitur menerima pinjaman terhadap negara kreditur dengan beberapa kondisi yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga, tetapi negara debitur tidak mampu atau sulit melunasi pinjaman yang diberikan oleh negara kreditur yang menyebabkan negara debitur terjebak oleh syarat – syarat yang sudah disepakati. Sehingga negara kreditur memiliki kontrol yang dapat mengatur negara debitur.

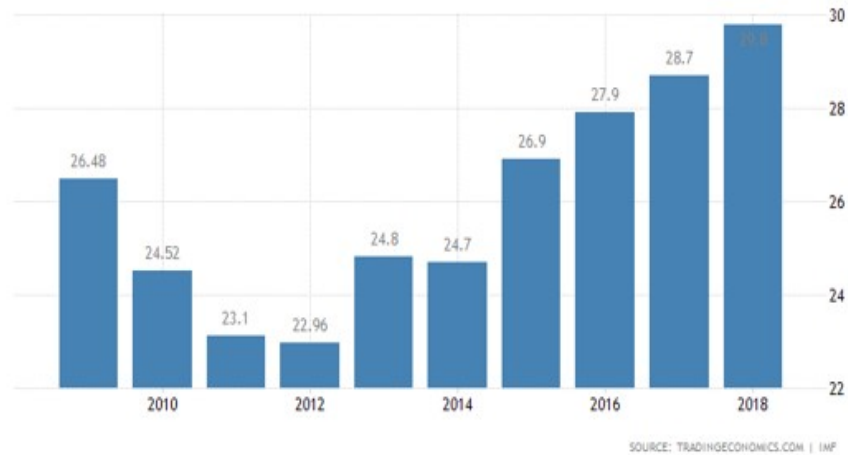
Perangkap hutang adalah konsekuensi dari jalan sistematis untuk utang yang tumbuh subur dalam konteks peningkatan ketimpangan dan berkurangnya intervensi pemerintah (Bajo & Roelants , 2011).

Negara yang bermasalah dengan hutang besar dengan negara lain akan menjadi korban jebakan hutang dari negara pemberi pinjaman. Faktor pertama yang mempengaruhi suatu negara terjebak dalam jebakan hutang adalah negara peminjam secara finansial lebih lemah dari negara yang memberikan pinjaman, lalu yang kedua diukur dari kondisi kredit pinjaman yang dapat dimodifikasi dengan bunga oleh negara pemberi pinjaman (Bajo & Roelants , 2011).

Negara yang sangat beresiko masuk ke dalam lingkaran perangkap hutang adalah negara yang hutangnya tumbuh subur, hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara besarnya pinjaman hutang dengan lemahnya kemampuan membayar peminjam. Semakin lemahnya finansial negara peminjam, maka semakin beresiko negara tersebut terjebak dalam perangkap hutang dari negara pemberi pinjaman. Pada akhirnya permasalahan jebakan hutang hanya dapat

diselesaikan dengan kemampuan politik oleh negara yang memberikan pinjaman (Bajo & Roelants, 2011).

Gambar 1. Debt to GDP Indonesia



Sumber : <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/government-debt-to-gdp>

Per tahun 2018, Indonesia memiliki hutang sebesar 29,80 persen dari total GDP (Gross Domestic Product) mereka, angka ini memang relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara lain. Namun Indonesia tetap perlu waspada karena rating kredit negara Indonesia termasuk kurang baik yaitu berada diangka 46.31 terhadap pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok melalui proyer *BRI* Tiongkok. Karena dikhawatirkan terdapat praktek Debt-Trap didalamnya.

Dapat kita ambil contoh dari kerja sama antara Tiongkok dan Sri Lanka. Di Sri Lanka, Tiongkok meminjamkan 1,5 miliar dolar untuk pembangunan Pelabuhan baru. Namun Sri Lanka mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok yang jatuh tempo pada akhir tahun 2016. Pada akhirnya di pertengahan tahun 2017, Tiongkok memulai program pertukaran piutang terhadap Sri Lanka yang menyebabkan jatuhnya 85% saham Pelabuhan Hambantota ke tangan Tiongkok yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2017. Dengan 85% saham tersebut, Tiongkok dapat ,mengontrol, dan mengelola Pelabuhan Hambantota.

Sri Lanka sebagai negara debitur menerima pinjaman dari Tiongkok sebagai negara kreditur dengan syarat yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga. Tetapi Sri Lanka tidak mampu membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok, hal itu dikarenakan perekonomian Sri Lanka yang kurang layak.

Dari kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa proyek *Belt and Road Initiative* ini cukup beresiko bagi negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam proyek ini, tidak terkecuali Indonesia. Di tahun 2016, Indonesia menerima pinjaman sebesar 1,46 miliar dolar untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kereta cepat, rel kereta pengangkut batu bara, dan juga pembanguna PLTU. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sepatutnya waspada setelah melihat kasus Sri Lanka yang gagal mengembalikan pinjaman ke Tiongkok.

1.3.2 Konsep Diplomasi Ekonomi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain. Ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan produksi, pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja dan investasi. Menurut Rashid diplomasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai perumusan dan kebijakan yang memajukan yang berkaitan dengan produksi, pergerakan atau pertukaran barang, jasa, tenaga kerja dan investasi di negara lain (Rashid, 2005).

Oleh karena itu, diplomasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara yang lain yang berhubungan dengan produksi, pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja dan investasi. Seperti halnya dalam kasus kali ini Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dengan Tiongkok yang didalamnya mencakup produksi, pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja dan investasi.

Pada kasus ini, di era Presiden Joko Widodo hubungan antara Indonesia dan Tiongkok mengalami peningkatan. Adanya peningkatan dalam kerja sama ekonomi pada kedua negara, baik itu investasi maupun di bidang perdagangan. Namun kedua negara memiliki permasalahan dalam bidang kedaulatan teritori, terutama di wilayah perairan natuna di sekitar laut Tiongkok selatan. Oleh karena itu, hubungan kedua negara ini dianggap memiliki benturan kepentingan. Hal ini dikhawatirkan bahwa aliran investasi Tiongkok ke Indonesia melalui bantuan yang berbentuk pinjaman untuk membangun sarana infrastruktur Indonesia mempengaruhi sikap Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Walaupun kedua bidang

memiliki karakter dan struktur kepentingan yang berbeda, tetapi kedua kepentingan ini memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Di bidang ekonomi, pada saat ini Indonesia membutuhkan dana untuk membangun infrastrukturnya. Oleh karena itu, Indonesia ikut serta dalam pembangunan proyek *Belt and Road Initiative* yang diinisiasi oleh Tiongkok dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Indonesia memanfaatkan situasi yang dimana Tiongkok ingin mengembangkan jalur sutra maritim melalui proyek BRI, karena pengembangan jalur sutra maritim ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia di era Joko Widodo yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia perlu mengembangkan infrastruktur, namun hal tersebut membutuhkan banyak dana. Oleh karena itu Indonesia menerima bantuan yang diberikan oleh Tiongkok melalui proyek tersebut untuk mengembangkan infrastruktur Indonesia. Namun proyek ini dianggap cukup beresiko, karena banyak negara yang tergabung dalam proyek ini terjerat dengan yang namanya jebakan hutang. Hal ini terjadi diakibatkan oleh negara yang menerima pinjaman bantuan tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bungannya yang diberikan oleh Tiongkok. Sehingga negara penerima bantuan kehilangan kontrol terhadap kebijakan negaranya.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, untuk menghindari terjadinya jebakan hutang, pada diplomasi ekonomi kali ini Indonesia membuat kebijakan dalam kerja samanya menggunakan skema B to B untuk kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek *Belt and Road Initiative* ini.

Untuk memahami cara yang diambil Indonesia dalam menghindari terjadinya jebakan hutang, kita harus mengetahui tentang skema bisnis G to G, G to B, dan juga B to B. Business to Business (B to B) adalah sebuah skema perdagangan yang dimana aktornya adalah antar badan usaha, sedangkan Government to Business adalah skema perdagangan yang aktornya adalah badan usaha dan pemerintah, sedangkan Government to government adalah skema perdagangan yang dilakukan oleh antar pemerintah dan terjadi pada saat transaksi utang melalui Surat Utang Negara, G to G dilakukan dalam rangka pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur melalui APBN dan G to G terjadi karena pemerintah suatu negara menerima pinjaman dari pemerintah negara lain.

Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah tidak menyertakan dananya pada proyek proyek yang masuk dalam program jalur sutra modern tersebut (Biro Perencanaan dan Informasi, 2019). Pemerintah Indonesia dan Tiongkok disebut hanya sebagai fasilitator dalam proyek *Belt and Road Initiative* tersebut, Luhut menjelaskan pemerintah tak ingin menggunakan skema G to G, karena hanya akan membuat uang mengalir ke Tiongkok. Sebab, Tiongkok langsung memberikan utang ke pemerintah Indonesia untuk membangun proyek tertentu. Namun, dengan skema B to B ini, Luhut Panjaitan yakin bahwa skema ini dapat menghindari terjadinya jebakan hutang. Karena dengan skema B to B ini Tiongkok memberikan pinjaman melalui badan usaha atau perbankan mereka. Sehingga, dengan menggunakan skema ini, pinjaman yang diberikan dalam proyek

Belt and Road Initiative ini tidak akan mempengaruhi posisi utang Indonesia. (Pebrianto, 2020)

1.4 Hipotesa

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori. untuk menghindari terjadinya jebakan hutang dalam kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek *Belt and Road Initiative*. Indonesia melakukan diplomasi ekonomi dengan skema kerja sama B to B (Business to Business) dengan tujuan agar dalam kerja sama tersebut tidak melibatkan surat piutang negara. sehingga resiko Indonesia terjat dalam jebakan hutang dalam proyek BRI relatif kecil.

1.5 Batasan Penelitian

Memberikan Batasan terhadap penelitian ini sangatlah penting, agar pembahasan penelitian ini lebih spesifik dan jelas. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2013 pada saat proyek *Belt and Road Initiative* ini dicetuskan hingga tahun 2019

1.6 Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dan analisis dari sumber sumber seperti jurnal,buku,berita,artikel dan sumber tulis ini. Lalu penulis juga menggunakan metode kualitatif, metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menyaring, memilah data untuk mendapatkan data yang berkualitas, valid, dan relevan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memberikan pemahaman mengenai isi penelitian, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan berisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang kebangkitan ekonomi Tiongkok dan Proyek *Belt and Road Initiative*, mulai dari dicetuskannya proyek ini, ruang lingkup kerja samanya, dan keterkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Bab III akan berisi penjelasan dan gambaran tentang kasus *Debt Trap* yang dilakukan oleh Tiongkok, dan penolakan penolakan dari beberapa negara

Bab IV akan berisi tentang proyek yang dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan skema B to B.

Bab V akan berisi kesimpulan yang berisi analisis pada bab-bab sebelumnya

1.8 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai *Debt Trap*
2. Memberikan informasi tentang strategi Indonesia dalam menghindari Debt-Trap